

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan satu hal yang sangat berbahaya terhadap individu dan masyarakat, aqidah dan kepercayaan, pikiran dan kebudayaan, demikian pula terhadap keluarga dan seluruh bangsa.<sup>1</sup> Suatu masyarakat terkategori masyarakat miskin disebabkan karena rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencarian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Esensi dari masyarakat miskin adalah menyangkut probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. Sehingga persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks dan berdimensi ganda, spiritual dan material serta mempunyai kaitan dengan berbagai aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86%. Angka tersebut terjadi pengurangan sebesar 0,50 juta jiwa dari tahun 2015 yaitu 28,51 juta jiwa.<sup>3</sup> Begitu juga distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di-DIY tahun 2014 sampai 2015 juga menunjukkan pengurangan angka di setiap kabupaten/kota.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Al-Qardhawiy, *Musykilatul Fakri wa Kaifa 'alajahal Islam*, alih bahasa Umar Fanany, Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Cet. 3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 13.

<sup>2</sup>Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 24.

<sup>3</sup>Persentase Penduduk Miskin Maret 2016, dikutip dari <http://www.bps.go.id> pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, jam. 13.36 WIB.

<sup>4</sup>*Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta 2016*, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, dikutip dari <http://www.bps.go.id> pada hari Ahad, tanggal 14 Januari 2017, jam. 13.08 WIB.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2015

Kabupaten	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	%
Kulonprogo	265.575	84,67	20,64
Bantul	301.986	153,49	15,89
Gunungkidul	243.847	148,39	20,83
Sleman	306.961	110,44	9,5
Yogyakarta	366.520	36,6	8,67
DIY	321.056	532,59	14,55

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagai realitas sosial, kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan secara mutlak, akan tetapi dapat diminimalisir, diatasi dan diperbaiki kualitasnya, sehingga tidak akan sampai pada penghancuran kemanusiaan.<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui bahwa semua bentuk sistem ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan dan mengeliminir kekurangan, kemiskinan, dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sistem ekonomi bekerja untuk menciptakan keadilan distribusi antar anggota masyarakat.

Dalam sistem ekonomi terdapat macam-macam sistem, yaitu sistem kapitalis, sosialis dan Islami. Antara sistem satu dengan sistem lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Sistem kapitalis menciptakan strata kemewahan dan senantiasa bekerja berdasar penimbunan kekayaan dan mempersubur monopoli dunia di bawah kontrol kekuatan manusia dan menjadi politik negara. Sehingga dengan sistem seperti itu hanya

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

menambah dan memperlebar kemiskinan dan kelaparan di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Sistem kapitalis terakumulasi semua bentuk monopoli dan koalisi-koalisi yang sesungguhnya ditujukan untuk membatasi kemampuan daya saing individu atau kelompok. Sedangkan sistem sosialis menempatkan organisasi sebagai pengganti individu dan negara yang menghegemoni setiap bidang kehidupan. Individu dilarang untuk memiliki barang sebagaimana larangan alokasinya. Oleh sebab itu, sistem kapitalis dan sistem sosialis tidak mampu menjadi solusi dalam permasalahan kemiskinan. Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat meminimalisir kemiskinan di suatu negara.<sup>7</sup>

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam bersumber pada sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan, salah satunya permasalahan dalam bidang ekonomi. Islam mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, cara memelihara harta serta cara menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan, merealisasikan kesejahteraan, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan.<sup>8</sup>

Suatu permasalahan yang klasik dan fundamental masih terjadi pada sejumlah masyarakat muslim saat ini, yaitu berupa kejahiliyahan, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, penindasan, dan lain sebagainya, ini merupakan persoalan-persoalan besar yang penanganannya membutuhkan

---

<sup>6</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Al-Iqthishad al-Islami; Ushusun wa Muba'un wa Akhdaf*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2004), hlm. 44-45.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>8</sup>*Ibid.*

kerja keras dan profesional.<sup>9</sup> Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk membendunginya, serta mengawasi kemungkinan yang dapat muncul guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, disamping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengharuskan agar setiap individu mencapai taraf hidup yang layak di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Tugas besar ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki semata. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan. Sehingga keterlibatan kaum perempuan untuk menangani persoalan ini sangat dibutuhkan. Kerja keras secara profesional oleh kaum muslimin dan muslimat adalah tuntunan agama dan bernilai ibadah.<sup>11</sup>

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki potensi yang sangat cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam merealisasikan kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh karenanya dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan.<sup>12</sup> Dalam GBHN tercantum bahwa kaum perempuan mempunyai hak, tanggungjawab dan memiliki kesempatan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Sehingga sebuah konsekuensi dalam perspektif kepentingan nasional kaum perempuan harus terlibat dan dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Husein Muhammad, *Fiqh perempuan; Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 120.

<sup>10</sup>Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Musykilatul...*, hlm. 51.

<sup>11</sup>Husein Muhammad, *Fiqh...*, hlm. 120.

<sup>12</sup>Nanik Triandayani, "Menggugah Partisipasi Kaum Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Millah*, Vol. V. No. 2 (Februari 2006), hlm. 194.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

Keberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan, apabila para perempuan diberdayakan secara ekonomi, intelektualitas, dan spiritualitas maka akan sangat efektif bagi pengembangan masyarakat dan bangsa. Hal ini disebabkan karena perempuan terlibat dalam pembangunan sosial dan bukan menjadi objek pembangunan sosial sehingga seluruh potensinya dapat berkembang secara wajar tanpa diskriminasi gender<sup>14</sup> Menurut Golla, pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki kontribusi yang lebih untuk keluarga, masyarakat dan ekonomi bangsa.<sup>15</sup>

Berdaya secara ekonomi sering dianggap sebagai salah satu jembatan bagi perempuan untuk bisa memiliki cukup kebebasan menentukan pilihan mereka sendiri di dalam hidup. Bergerak di dalam usaha mikro atau kecil adalah salah satu cara relatif mudah untuk mendapat penghasilan sendiri. Menurut Nursyahbani, penelitian kualitatif terhadap perempuan pengusaha kecil dan menengah di Jakarta memperlihatkan nilai-nilai patriarkhi terinternalisasi di dalam diri perempuan wirausaha. Padahal, sebagai pengusaha mereka dituntut untuk memiliki kepemimpinan, kemampuan membuat keputusan secara cepat, dan terus menerus melakukan inovasi.

Sifat-sifat yang mandiri di dalam mengembangkan usaha ternyata tidak serta merta dapat diterapkan di dalam rumah tangga. Perempuan harus selalu menegosiasikan antara upaya mengembangkan usaha dengan menjaga rumah tangganya, dalam hal ini melakukan negosiasi terus-menerus dengan suami sebagai cara menyeimbangkan antara kegiatan usaha dan rumah

---

<sup>14</sup>Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara 2009), hlm. 193.

<sup>15</sup>Mariam Sohail, "Women Empowerment and Economic Development-An Exploratory Study in Pakistan" *Developing Country Studies*, Vol. 4, No. 9, 2014, hlm. 165, dikutip dari <http://www.iiste.org> pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2016, jam. 17.06 WIB.

tangga.<sup>16</sup> Oleh karena itu, perempuan harus disediakan keterampilan, kesempatan dan akses yang sama dalam lembaga ekonomi. Perempuan harus memiliki kekuatan untuk membuat dan melaksanakan keputusan ekonomi. Menurut data BPS menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tingginya penduduk perempuan berusia produktif yang tidak memiliki keterampilan, hampir 77% penduduk DIY tergolong *unskill citizen*.<sup>17</sup>

Disisi lain yang terjadi adalah masih adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Salah satunya dalam hal permodalan, meminjam dari lembaga keuangan formal seperti bank bukan hal yang mudah, kendalanya terutama menyangkut agunan. Di kalangan masyarakat laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, biasanya aset diatasnamakan laki-laki yang berakibat pada kesulitan perempuan mengajukan agunan untuk pinjaman.<sup>18</sup>

Data BPS tahun 2002 menyebutkan, terdapat 33,3% perempuan yang memasuki usia kerja (15 tahun) yang berusaha sendiri, baik tanpa bantuan pekerja atau yang menggunakan pekerja. Meskipun jumlah mereka besar, tetapi akses perempuan terhadap kredit sangat rendah disebabkan aturan pemberian kredit seperti adanya agunan, bentuk usaha yang formal, persetujuan suami, dan urusan administrasi menyebabkan perempuan terutama di sektor usaha mikro dan kecil di pedesaan kesulitan mengakses kredit tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Sulistiyowati Irianto, (Pengh.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 547.

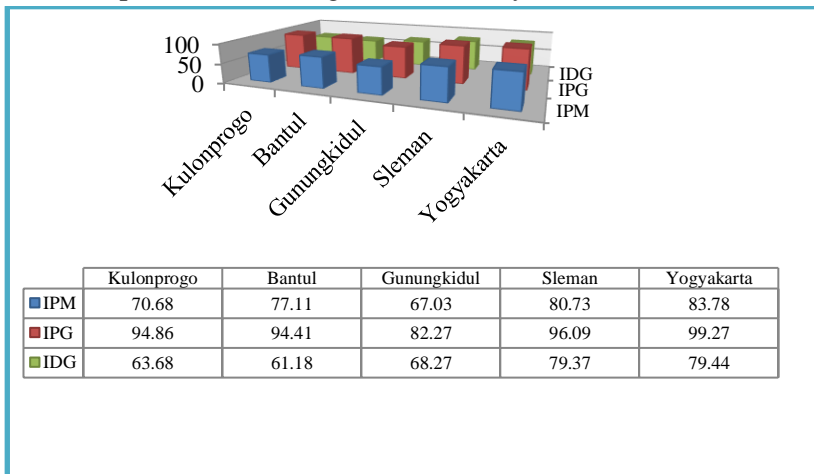
<sup>17</sup>*Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 5. dikutip dari <http://www.bppm.jogjaprovo.go.id> pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017, jam. 12.19 WIB.

<sup>18</sup>Sulistiyowati Irianto, (Pengh.), *Perempuan ...*, hlm .543

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 548.

Fenomena di atas merupakan persoalan gender yang berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem *patriarki* yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, struktural, dan ekologis. Sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini diperkuat dengan adanya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Berdaya Gender (IDG) kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Indeks berdaya gender (IDG) adalah indikator dalam menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan gambar 1 berikut terjadi ketimpangan gender dalam kehidupan ekonomi pada tahun 2014 IDG paling rendah dialami oleh kabupaten Bantul dengan indeks hanya 61,18.<sup>20</sup>



Gambar 1. Data IPM, IPG dan IDG menurut Kabupaten/Kota di DIY (2014)

Sumber: BPS/Kementrian PP & PA, 2016

<sup>20</sup>Data Gender, Badan Pemberdayaan ..., hlm. 30.

Dengan berbagai persoalan yang ada, sebuah optimistis dalam penyelesaian masalah ekonomi khususnya melalui hadirnya *microfinance* yang keberadaannya sebagai alat pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan *microfinance* dalam mencapai tujuan pembangunan telah dibuktikan di negara-negara berkembang.<sup>21</sup> Salah satu *microfinance* di Yogyakarta yang *concern* pada pengentasan kemiskinan adalah *microfinance* GEMI (Gerakan Ekonomi Kaum Ibu).

GEMI merupakan lembaga atau lebih tepatnya koperasi penyedia pembiayaan untuk usaha mikro yang mayoritas beranggotakan kaum perempuan, dengan pinjaman modal usaha melalui cara yang murah dan mudah serta tanpa jaminan. Pola GEMI ini mereplikasi pada pola *Grameen Bank*. Maka dari itu, hadirnya GEMI bertujuan untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan usaha kaum perempuan dengan mengkombinasikan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup anggota dan keluarganya.<sup>22</sup> Koperasi GEMI adalah satu-satunya koperasi berbasis syariah yang beranggotakan khusus kaum perempuan.

Berdasarkan latar belakang ini perlu diadakan pengkajian mendalam terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan harapan akan terjadi keseimbangan atau keselarasan kerjasama antara kekuatan perempuan dan kekuatan laki-laki untuk mewujudkan kesejahteraan. Cukup banyak penelitian yang ditemui membahas tentang hal ini, yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan yang dimunculkan hanya kesejahteraan perspektif konvensional atau keduniawian saja, tanpa

---

<sup>21</sup>Muhammad Kamal Zubair, "Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

<sup>22</sup>Profil GEMI, dikutip dari [http://www.gemi.co.id/tentang\\_kami/](http://www.gemi.co.id/tentang_kami/) pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, jam 07.58 WIB.



memasukkan aspek spiritual dan jauh dari makna kesejahteraan hakiki.

Oleh karena itu, penting adanya penelitian dari sudut pandang berbeda, yang fokus pembahasannya pada kesejahteraan dunia akhirat. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Irfan Syauqi Beik tentang aplikasi Model CIBEST dalam mengukur tingkat kesejahteraan perspektif Islam.<sup>23</sup> Sebuah upaya untuk mengembangkan parameter pembangunan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengakomodasi konsep kemiskinan materiil dan spiritual secara bersamaan. Konsep ini hadir dengan berbagai alasan yang mendasar diantaranya yaitu; Pertama, kebijakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah universal. Kedua, penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal.<sup>24</sup>

Sehingga dalam konteks ini kesejahteraan tidak hanya kesejahteraan dunia saja, namun kesejahteraan akhirat lebih penting untuk diperhatikan. Tambahan lain bahwa kepentingan akhirat pada dasarnya adalah masalah pribadi, namun akan tercapai secara efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerja berjama'ah dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Pengaruh *Microfinance* GEMI Bantul Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Anggota Melalui Pendekatan CIBEST".

---

<sup>23</sup>CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) adalah salah satu alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan perspektif syariah, yang terdiri atas kuadran CIBEST dan indeks-indeks kesejahteraan, kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut. CIBEST ini dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti pada tahun 2014 dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kampus IPB.

<sup>24</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 12.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh *microfinance* GEMI Bantul Yogyakarta terhadap kesejahteraan anggota melalui pendekatan CIBEST?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh *microfinance* GEMI terhadap kesejahteraan anggota.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan teori kesejahteraan ekonomi perempuan dan optimalisasi fungsi serta peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mensejahterakan anggotanya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program GEMI Bantul Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis adalah satu kesatuan yang integral dan urgen. Dengan demikian, untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua adalah kajian penelitian terdahulu, landasan teori yang berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai *microfinance*, dan teori kesejahteraan secara umum dan dalam perspektif ekonomi Islam serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Bab ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan apa saja yang kemungkinan terjadi dalam kesejahteraan perempuan.

Bab ketiga berisi metode penelitian, bab ini membahas mengenai metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab keempat membahas tentang gambaran umum *microfinance* GEMI dan anggota GEMI yang menjadi responden, serta analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum yang menjelaskan tentang kondisi wilayah penelitian. Dalam bab ini juga membahas analisis pengumpulan data yang diperoleh dari proses penelitian dilapangan, hasil angket maupun dari hasil wawancara dengan anggota dan pengelola GEMI Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut dideskripsikan.